RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah perencanaan teknis operasional tahunan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri mempunyai tujuan Meningkatkan perekonomian sektor industri, dengan dua sasaran berupa: (1) Meningkatnya sektor perdagangan dan (2) Meningkatnya sektor perindustrian. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Perdagangan membuat Rencana Kerja Tahun 2025.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas serta dapat dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan terarah. Apabila dalam kurun waktu satu tahun berjalan terjadi perubahan, maka dilakukan langkah penyesuaian dengan situasi dan kondisi obyektif yang terjadi.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami sampaikan terima kasih, kritik dan saran selalu kami harapkan guna perbaikan.

Kediri, - - 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KEDIRI

drh. TUTIK PURWANINGSIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740807 200312 2 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD... 15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 29
3.3. Program dan Kegiatan TA. 2024 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

BAB V PENUTUP 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD, Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan rancangan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Pada tahun 2025 merupakan tahun ke-5 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja SKPD yang akan tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2025. Sedangkan **tujuan** disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menyiapkan program/kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2025, meliputi :

- BAB I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.3. Program Dan Kegiatan

- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri pada tahun tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selama Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan perkiraan target yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEDIRI

KODE	*Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan*	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
3.30.01	**Program penunjang urusan pemerintahan**									
3.30.01.2.01	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.01.2.03.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan asset ttap yang terpelihara	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

KODE	*Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan*	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah standarisasi pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	100%	2 pasar	2 pasar	100%
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan bahan pokok dan operasi pasar sembako bersubsidi	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100%	10 kali	10 kali	100%
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha ekspor yang memiliki produk unggulan	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	100%	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	100%
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	100%	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	100%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	100%	7 kali	7 kali	100%
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industry yang terstandarisasi	15 industri	15 industri	20 industri	20 industri	100%	20 industri	20 industri	100%

KODE	*Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan*	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
3.31.04.2.01.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan industry yang menggunakan siinas**	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	100%	50 perusahaan	50 perusahaan	**100%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri memiliki ***tujuan*** *untuk meningkatkan perekonomian sektor industri* dengan indikator berupa presentase pertumbuhan ekspor dan presentase pertumbuhan IKM. Dengan 2 s**asaran** yaitu: (*1) Meningkatnya volume perdagangan dan (2) Meningkatnya pertumbuhan IKM.* Kinerja Dinas Perdagangan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Meningkatnya sektor perdagangan

Untuk meningkatkan sektor perdagangan Dinas Perdagangan mempunyai 4 program yaitu: (1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. (2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. (3) Program Pengembangan Ekspor. (4) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen. (5) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Disamping itu, Dinas Perdagangan juga mengelola Retribusi Pelayanan Pasar Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang dengan indikator capaian kinerja berupa persentase PAD yang diperoleh.

Dalam upaya meningkatkan sektor perdagangan dilakukan:

1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
2) Penyelenggaraan promosi dagang pameran dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
3) Pelaksanaan promosi, pemasaran dan pemasaran produk dalam negeri.

Peningkatan usaha perdagangan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pelaku perdagangan berupa peningkatan pengetahuan usaha dan keterampilan melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan konsultasi, penyuluhan, temu usaha, riset pasar, serta fasilitasi kemitraan usaha perdagangan. Dengan demikian diharapkan kapasitas pelaku perdagangan meningkat menjadi lebih mandiri, berkelanjutan, tumbuh dan memiliki daya saing.

Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dilakukan dengan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan kegiatan berupa: pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk, serta peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan.

Penyediaan sarana distribusi perdagangan dilakukan dengan perencanaan kegiatan berupa: Pembangunan/revitalisasi pasar daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, Sistem Resi Gudang (SRG), serta pengadaan sarana prasarana perdagangan.

Standarisasi dan perlindungan konsumen dilakukan berupa kegiatan: pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan untuk menjamin kepastian ukur/timbang dalam perdagangan, operasi pasar, pasar lelang, serta pasar murah.

Meningkatnya pertumbuhan IKM

Untuk meningkatkan pertumbuhan IKM, Dinas Perdagangan mempunyai 2 program yaitu: (1) Program perencanaan dan pembanguanan industri dengan indikator capaian kinerja berupa angka pertumbuhan IKM baru, dan (2) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan indikator capaian kinerja berupa angka pertumbuhan IKM. Dengan adanya indikator-indikator capaian kinerja tersebut diharapkan bisa menjadi acuan kinerja Dinas Perdagangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan IKM di Kabupaten Kediri.

Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dilakukan karena potensi industri kecil menengah di Kabupaten Kediri sangat besar, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Pengembangan ini dipengaruhi dan didukung oleh sentra-sentra industri potensial dengan menggali dan mengembangkan serta mempromosikan produk-produk inovatif dan kreatif lokal guna meningkatkan daya saing produk lokal terhadap produk dari luar daerah.

Tercapainya kinerja sasaran berupa meningkatnya sektor perdagangan dan meningkatnya pertumbuhan IKM, diharapkan tujuan untuk meningkatkan perekonomian sektor industri bisa tercapai. Capaian kinerja Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KEDIRI

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
9	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	1 pasar	
10	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
11	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
12	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	
13	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	
14	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	
15	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15 industri	15 industri	20 industri	20 industri	15 industri	15 industri	15 industri	20 industri	20 industri	
16	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

2.3.1 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kediri.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri melakukan upaya dan langkah-langkah serta menyikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui program kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

   Kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

3. **Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

   Kegiatan :

a. Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pengendalian harga, stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

4. **Program Pengembangan Ekspor**

   Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5. **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.**

   Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

6. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.**

   Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

7. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.**

   Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

8. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

   Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota.

2.3.2 Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam Pemberdayaan bidang Perdagangan dan Perindustrian saat ini

Permasalahan Pembangunan yang terkait dengan perdagangan saat ini antara lain: Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam Pemberdayaan perdagangan dan perindustrian saat ini antara lain :

Tabel Pemetaan Permasalahan Dinas Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
BIDANG PERDAGANGAN		
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan yang belum sesui SNI	Pasar tradisional terkesan kumuh, belum menerapkan teknologi, dan merupakan bangunan lama yang perlu revitalisasi.
	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kurangnya ketersedian barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Belum optimalnya kegiatan ekspor oleh pelaku usaha	Pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait aktivitas ekspor
		Belum optimalnya pengendalian impor
	Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga
	Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Tingginya biaya distribusi dan logistik
		Kurangnya promosi
BIDANG PERINDUSTRIAN		
Belum optimalnya pertumbuhan sektor industr	Rendahnya produktivitas Industri	Tingginya ketergantungan pada bahan baku impo
		Belum adanya kawasan industri di daerah
	Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan	Belum optimalnya sistem informasi dan data industri dan perdagangan
	Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri	Produk IKM belum memenuhi standarisasi
		Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM
		Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM
		Belum optimalnya penggunaan sistem informasi SIINAS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis serta strategi dan arah kebijakan yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sebagai berikut :

Tabel Strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan

VISI : *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis, religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani"*			
MISI KE-3 : *"Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah"*			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
TUJUAN 1: Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan	**SASARAN 1:** Meningkatnya volume perdagangan	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Membangun dan Mengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			Mengendalikan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota
		3. Pengembangan Ekspor	Menyelenggarakan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		4. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Melaksanakan Metrologi Legal berupa: Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		5. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
TUJUAN 2: Meningkatkan sektor industri	**SASARAN 2:** Meningkatnya pertumbuhan IKM	1. Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Menyusun, Menerapkan dan Mengevaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		2. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Menyediakan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri meliputi:

- **Tantangan**
  1. Meningkatnya harga bahan baku yang meningkatkan biaya produksi;
  2. Kompetitor produk IKM dari daerah semakin banyak;
  3. Banyaknya pasar modern dan waralaba yang bermunculan;
  4. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih memilih belanja di pasar modern yang lebih mudah, bersih, dan nyaman;
  5. Apabila pengendalian, pelayanan tera dan tera ulang tidak terlaksana,dengan baik akan menyebabkan tidak terjamin/terlindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan terkait kebenaran pengukuran UTTP.
- **Peluang**
  1. Permintaan produk IKM masih tinggi;
  2. Masyarakat semakin konsumtif;
  3. Pangsa pasar ekspor masih terbuka luas;
  4. Adanya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang mendukung pemberdayaan pasar tradisional agar tumbuh dan berkembang;
  5. Peningkatan PAD melalui retribusi pelayanan pasar dan metrologi legal;
  6. Banyaknya potensi UTTP di Kabupaten Kediri.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kinerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
						Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			49.487.982.325			16.323.994.880	
					SEKRETARIAT			**12.237.212.662**			**12.079.655.247**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase indikator program yang tercapai	90 %	12.237.212.662	Presentase indikator program yang tercapai	90 %	12.079.655.247	
3	30	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 dokumen	9.758.400	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 dokumen	9.758.400	
3	30	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.426.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.426.400	cetak laporan, rapat
3	30	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.872.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.872.000	cetak laporan, rapat
3	30	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.460.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.460.000	cetak laporan, rapat
3	30	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	2 laporan	8.862.614.950	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	2 laporan	8.862.614.950	
3	30	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.654.534.950	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.654.534.950	gaji dan tpp PNS dan PPPK
3	30	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	208.080.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	208.080.000	Hr adm keuangan
3	30	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 laporan	19.800.000	Jumlah Laporan	2 laporan	19.800.000	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
						Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	30	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.800.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.800.000	
3	30	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 dokumen	295.800.000	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 dokumen	22.200.000	
3	30	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000	pakaian/kaos pasar
3	30	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	280.800.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	7.200.000	pendidikan dan pelatihan
3	30	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 laporan	762.991.660	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 laporan	769.934.245	
3	30	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	57.679.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	57.679.000	penyediaan lampu dan peralatan listrik pasar
3	30	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.236.460	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.236.460	peralatan dan perlengkapan kantor
3	30	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.258.300	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.258.300	alat pembersih
3	30	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.100.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.100.000	cetak kantor (SPPD, kop, kendali dll)
3	30	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.759.900	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.759.900	
3	30	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	487.958.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	494.900.585	Perjlanan dinas dan mamin rapat
3	30	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 Laporan	146.350.000	Jumlah laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 Laporan	88.550.000	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
						Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	30	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	34.870.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	34.870.000	pengadan mebel pasar
3	30	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	111.480.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	53.680.000	pengadan peralatan dan mesin (Laptop 2, printer 4) PC 0
3	30	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan	1.793.297.652	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan	2.010.197.652	
3	30	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000	jasa surat menyurat
3	30	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	454.697.652	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	454.697.652	telepon listrik kantor dan pasar
3	30	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.324.600.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.541.500.000	Outsourcing 19org (kebersihan 17+5; keamanan 2+1), sewa kendaraa 2unit 192jtn, tenaga kontrak 5org, iklan media 100jt
3	30	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	2 Laporan	346.600.000	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	2 Laporan	296.600.000	
3	30	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	169.100.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	169.100.000	pemeliharaan dan pajak
3	30	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	67.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	67.500.000	pemeliharaan peralatan mesin lainnya
3	30	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	pemeliharaan siabda

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
						Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	30	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	100.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Kantor, pasar, sik, srg
					BIDANG PASAR			**34.902.682.863**			**3.300.074.133**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Presentase pasar yang memenuhi standar	50 %	**34.902.682.863**	Presentase pasar yang memenuhi standar	50 %	**3.300.074.133**	
3	**30**	**03**	**2,01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah standarisasi pasar	2 Pasar	**34.902.682.863**	Jumlah standarisasi pasar	2 Pasar	**3.300.074.133**	
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	31.664.032.863	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	330.544.133	Pembangunan Rp 72.533 dan pengawasan Rp60.000 Pasar Ngadiluwih, Renovasi fasad pasar Ngringging. Tenaga Ahli Pendamping Rp 30,000 ; Cetak karcis Rp96,8jt, Buku ijin Rp 42,560,000, Pemeliharaan Rp 14,506,600; Pemeliharaan aplikasi 10jt; sewa lahan 100jt;
3	30	03	2,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	3.238.650.000	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	2.969.530.000	tenaga kontrak pasar (77org : 2,7M), bbm operasional truk sampah 150jt, fasilitasi pasar (sosialisasi, monev)
					BIDANG PERDAGANGAN			**2.348.086.800**			**944.265.500**	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
						Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Presentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	**864.994.700**	Presentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	**175.931.000**	
3	**30**	**04**	**2,01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Dokumen harga barang kebutuhan pokok dan arang penting	12 Dokumen	**249.999.000**	Jumlah Dokumen harga barang kebutuhan pokok dan arang penting	12 Dokumen	**16.386.000**	
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	249.999.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	16.386.000	- Pengawasan Barang Penting di Lapang - Pembinaan Swalayan dan verifikasi TDG - Penyusunan Raperda Penataan Swalayan
3	**30**	**04**	**2,02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah pemantauan bahan pokok dan operasi pasar sembakobersubsidi	10 Kali	**495.006.200**	Jumlah pemantauan bahan pokok dan operasi pasar sembakobersubsidi	10 Kali	**135.512.500**	
3	30	04	2,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	`	260.006.000	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	`	124.175.000	- Pemantauan harga harian yang di upload dalam aplikasi Simarko, Siskaperbapo dan SP2KP. Pemantauan harga secara berkala Tim Satgas Pangan - Upgrade dan pemeliharaan Simarko - HR enumerator
3	30	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	235.000.200	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	11.337.500	Pelaksanaan Operasi Pasar, Gelar Pangan Murah, Pasar Murah TPID
	30	04	2,03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**119.989.500**			**24.032.500**	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
						Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
	30	04	2,03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	12 laporan	119.989.500	Laporan	12 laporan	24.032.500	- Pelaksanaan monev pupuk bersubsidi - HR KP3
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Presentase Produk Ekspor Unggulan	70 %	**892.612.000**	Presentase Produk Ekspor Unggulan	70 %	**445.812.600**	
3	**30**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha ekspor yag memiliki produk unggulan	5 Pelaku Usaha	**892.612.000**	Jumlah pelaku usaha ekspor yag memiliki produk unggulan	5 Pelaku Usaha	**445.812.600**	
3	30	05	2,01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 Pelaku Usaha	630.732.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 Pelaku Usaha	334.932.600	Inacraft, Jatim Fair, Misi Dagang
3	30	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha	261.880.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha	110.880.000	Pameran dagang lokal (Kriya Indonesia dll)
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Presentase pelaku usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	90 %	**365.480.100**	Presentase pelaku usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	90 %	**97.521.900**	
3	**30**	**06**	**2,01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	900 Pelaku Usaha	**365.480.100**	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	900 Pelaku Usaha	**97.521.900**	
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000 Unit	365.480.100	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000 Unit	97.521.900	Pelayanan Tera/Tera Ulang Kantor,Sidang Pasar, dan Loko. Sosialisasi Kemetrologian. Pengawasan UTTP dan BDKT
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Presentase kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70 %	**225.000.000**	Presentase kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70 %	**225.000.000**	
3	**30**	**07**	**2,01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah promosi dan pemasaran produk dalam negei yang dilaksanakan	7 Kali	**225.000.000**	Jumlah promosi dan pemasaran produk dalam negei yang dilaksanakan	7 Kali	**225.000.000**	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
						Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	225.000.000	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	225.000.000	Gempita Kemerdekaan,Hari Jadi Kab Kediri
					BIDANG PERINDUSTRIAN			**2.030.148.000**			**793.789.500**	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**2.030.148.000**			**793.789.500**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	**1.963.316.500**	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	**783.376.500**	
3	**31**	**02**	**2,01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah industri yang terstandarisasi	15 Industri	**1.963.316.500**	Jumlah industri yang terstandarisasi	15 Industri	**783.376.500**	
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen, 5 laporan kegiatan	96.976.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen, 5 laporan kegiatan	88.476.000	Program Peprcepatan P3DN, Pembinaan Sentra Industri (3 kegiatan: Kec. Puncu, Banyakan, Kayen Kidul)
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.866.340.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	694.900.500	KFBF 2025 , Merk (100 merek), Halal (21 buah), Uji Nutrisi (20 produk), Standarisasi Mutu Produk (3 kegiatan: Kec. Plemahan, Kandat, Tarokan), Workshop Penanggulangan Kemiskinan (6 Kegiatan : Kec. Tarokan, Purwoasri, Badas, Banyakan, Semen, Mojo), Workshop

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
						Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
												Pengolahan Serat Nanas
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	**66.831.500**	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	**10.413.000**	
3	**31**	**04**	**2,01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	12 Kali	**66.831.500**	Jumlah penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	12 Kali	**10.413.000**	
3	31	04	2,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	66.831.500	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.413.000	Pendataan GIIS dan Pendampingan SIINAS
TOTAL								**51.518.130.325**			**17.117.784.380**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri pada tahun 2023 terdapat 8 program dan 11 kegiatan, sedangkan pada tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 8 program dan 14 kegiatan. Sedangkan pada Tahun 2025 terdiri dari 8 program dan 14 kegiatan Dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Pelaku Usaha dan Proposal Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) dan pihak-pihak terkait yang lain.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dalam menyusun program dan kegiatan sudah menyesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pemberdayaan Perdagangan dan Perindustrian yaitu Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan didukung oleh program-program yang lain sesuai dengan potensi daerah.

3. 2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.2.1 Tujuan

Penetapan **tujuan** dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Dinas Perdagangan mempunyai tujuan yaitu: meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan meningkatkan sektor industri.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri menetapkan sasaran :

1. Meningkatnya volume perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM).

3.3. Program dan Kegiatan TA. 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan melaksanakan Program dan Kegiatan sebanyak **8** program, **16** kegiatan antara lain :

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Indikator	
						Uraian	Target
1					2	3	4
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		
					SEKRETARIAT		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase indikator program yang tercapai	90 %
3	30	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 dokumen
3	30	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
3	30	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
3	30	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
3	30	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	2 laporan
3	30	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan
3	30	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
3	30	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 laporan
3	30	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
3	30	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 dokumen
3	30	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
3	30	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
3	30	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 laporan
3	30	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
3	30	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Indikator	
						Uraian	Target
1					2	3	4
3	30	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
3	30	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
3	30	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
3	30	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
3	30	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 Laporan
3	30	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit
3	30	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit
3	30	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan
3	30	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
3	30	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3	30	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
3	30	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	2 Laporan
3	30	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
3	30	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit
3	30	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit
3	30	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit
					BIDANG PASAR		
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Presentase pasar yang memenuhi standar	50 %
3	**30**	**03**	**2,01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah standarisasi pasar	2 Pasar
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit
3	30	03	2,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit
					BIDANG PERDAGANGAN		
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Presentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %
3	**30**	**04**	**2,01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Dokumen harga barang kebutuhan pokok dan arang penting	12 Dokumen
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen	12 Laporan

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Indikator	
						Uraian	Target
1					2	3	4
						dan Pasar Rakyat	
3	**30**	**04**	**2,02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah pemantauan bahan pokok dan operasi pasar sembakobersubsidi	10 Kali
3	30	04	2,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	`
3	30	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan
	30	04	2,03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
	30	04	2,03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	12 laporan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Presentase Produk Ekspor Unggulan	70 %
3	**30**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha ekspor yag memiliki produk unggulan	5 Pelaku Usaha
3	30	05	2,01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 Pelaku Usaha
3	30	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Presentase pelaku usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	90 %
3	**30**	**06**	**2,01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	900 Pelaku Usaha
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000 Unit
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Presentase kegiatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70 %
3	**30**	**07**	**2,01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah promosi dan pemasaran produk dalam negei yang dilaksanakan	7 Kali
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM
					BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%
3	**31**	**02**	**2,01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah industri yang terstandarisasi	15 Industri
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen, 5 laporan kegiatan

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	Indikator	
						Uraian	Target
1					2	3	4
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%
3	**31**	**04**	**2,01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	12 Kali
3	31	04	2,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perdagangan						17.117.784.380,00							50.076.057.719,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.117.784.380,00							50.076.057.719,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						16.323.994.880,00							47.524.057.719,00	
1	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	12.079.655.247,00						-	12.439.824.302,00	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.758.400,00			-	-	-	-	13.440.000,00	
	3	30	01	2.01	0001														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.426.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.980.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0006														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.872.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.460.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.460.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.862.614.950,00			-	-	-	-	8.884.534.950,00	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	8.654.534.950,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.654.534.950,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	208.080.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	19.800.000,00			-	-	-	-	19.800.000,00	
	3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	19.800.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.200.000,00			-	-	-	-	364.562.000,00	
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-		14.562.000,00	DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														ALOKASI UMUM						
	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	7.200.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	769.934.245,00			-	-	-	-	927.977.200,00	
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	57.679.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.781.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.236.460,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.943.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	60.258.300,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.172.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	64.100.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		272.960.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.759.900,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.120.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	494.900.585,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	88.550.000,00			-	-	-	-	139.612.500,00	
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	34.870.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	53.680.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.612.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.010.197.652,00			-	-	-	-	1.743.297.652,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	454.697.652,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		454.697.652,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.541.500.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.274.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	296.600.000,00			-	-	-	-	346.600.000,00	
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	169.100.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		169.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	67.500.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	3.300.074.133,00						-	32.809.623.592,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	3.300.074.133,00			-	-	-	-	32.809.623.592,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	330.544.133,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.330.538.392,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				17 Unit	2.969.530.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.479.085.200,00	DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	175.931.000,00						-	865.000.000,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	16.386.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	16.386.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	135.512.500,00			-	-	-	-	495.000.000,00	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	124.175.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		260.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	11.337.500,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		235.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.032.500,00			-	-	-	-	120.000.000,00	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	24.032.500,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	445.812.600,00						-	884.609.825,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	445.812.600,00			-	-	-	-	884.609.825,00	
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				15 Pelaku Usaha	334.932.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		630.880.000,00	DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	05	2.01	0003															Pameran Dagang Lokal
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	110.880.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		253.729.825,00	DINAS PERDAGANGAN
5	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	97.521.900,00						-	350.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	97.521.900,00			-	-	-	-	350.000.000,00	
	3	30	06	2.01	0001															Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				10000 Unit	97.521.900,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	225.000.000,00						-	175.000.000,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	225.000.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	
	3	30	07	2.01	0005															Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	225.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						793.789.500,00							2.552.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	783.376.500,00						-	2.427.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	783.376.500,00			-	-	-	-	2.427.000.000,00	
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	88.476.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		177.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	694.900.500,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		2.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
8	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	10.413.000,00						-	125.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.413.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				**2 Dokumen**	**10.413.000,00**	**Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**-**	**-**	**-**		**125.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	J U M L A H											**17.117.784.380**							**50.076.057.719**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD, Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri menyertakan anggaran dan pendanaan yang mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan.

Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri terdiri dari berbagai sumber pendanaan, yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
3. Pajak Rokok

BAB V
P E N U T U P

Di dalam laporan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggara program/kegiatan Dinas Perdagangan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - 07 - 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KEDIRI

drh. TUTIK PURWANINGSIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740807 200312 2 004

BUPATI KEDIRI,

.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA